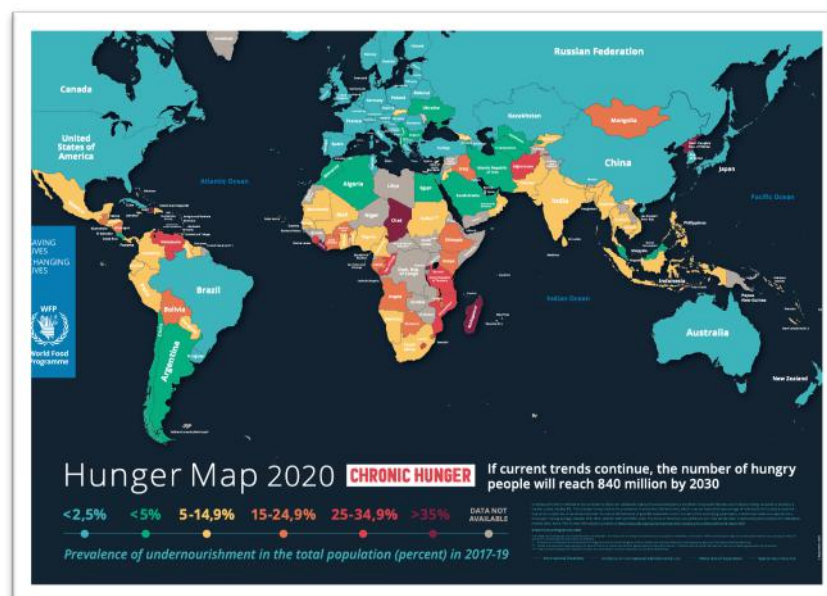


Bab 1

1.1. Pendahuluan

Pertanian adalah komoditas utama masyarakat Nigeria. Data terakhir pada tahun 2019 membuktikan bahwa pertanian telah menyumbang sekitar 22% pada GDP dan mempekerjakan sekitar 34,97% penduduk Nigeria (World Bank, 2021a; World Bank, 2021b). Persentase tersebut membuktikan bahwa hingga detik ini perekonomian Nigeria masih sangat bergantung pada petani yang mengelola sektor pertanian, bahkan dikatakan bahwasanya para petani inilah yang kemudian memproduksi sekitar hampir 99% pertanian (Eluhaiwe, 2008:181-184; Francis & David, 2012:7; Apata et al, 2010:85). Mengenai kepemilikan lahan, rata-rata petani di Nigeria memiliki sekitar 0,5 hektar lahan pertanian dan ternak. Secara khusus pertanian masyarakat Nigeria mengandalkan 5 tanaman utama seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang-kacangan dan millet (Fao, 2018). Walaupun diberkati dengan sumber daya melimpah, sayangnya Nigeria masih diklasifikasikan sebagai negara berpenghasilan menengah ke bawah (Eluhaiwe, 2008:181; Otahana, 2013:27; Fao, 2018). Berdasarkan laporan National Biro Statistic 40% penduduk dari total populasi di Nigeria masih hidup dalam kemiskinan (World Bank, 2020c). Jika dilihat pada gambar 1 maka dapat dipastikan bahwa masalah kerawanan pangan masih menjadi isu utama masyarakat disana. Dikatakan bahwasanya pada tahun 2020 kerawanan pangan meningkat menjadi 3,8 juta jiwa, diperkirakan terdapat 1,1 juta perempuan dan anak mengalami gizi buruk (Worldometers, 2021; Action Against Hunger, t.t).

Gambar 1: *World's Hunger Map in 2020.*



Sumber: *World Food Programs, 2020.*

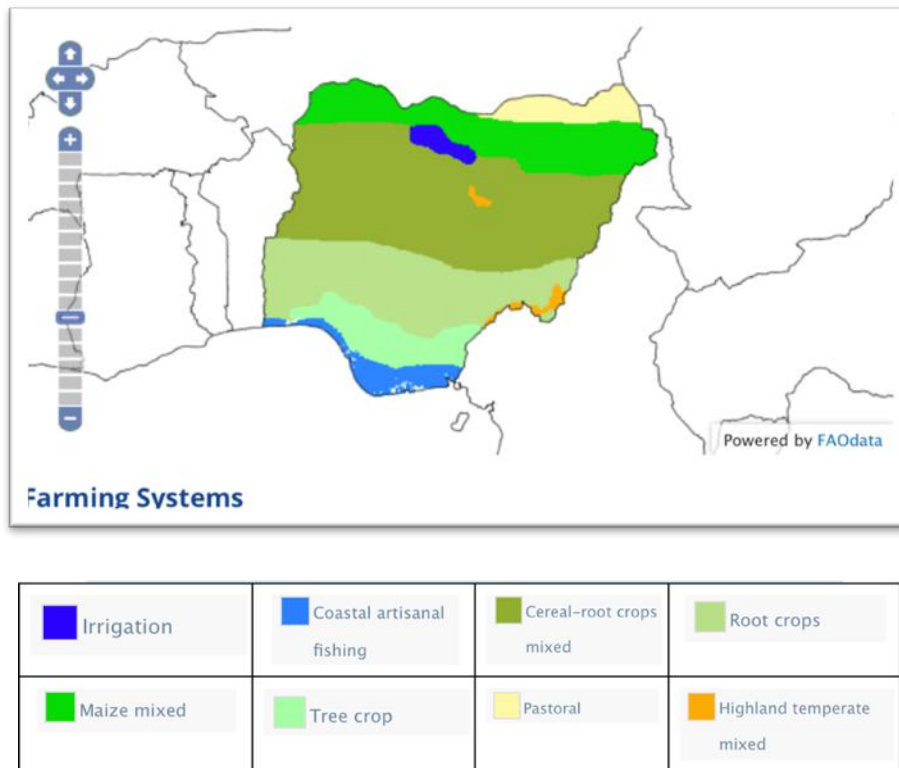
Sebenarnya terdapat banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi pangan (Auerbach, 2013:17). Salah satunya adalah melalui penyaluran dana bantuan luar negeri *non-state actor* yang dikenal dengan istilah *philanthropy*. Bill dan Melinda Gates Foundation atau BMGF adalah salah satu bentuk lembaga *philanthropy* terbesar dan berpengaruh di dunia. Salah satu pengaruhnya ialah ketika yayasan ini bersama dengan beberapa rekan seperti *Rockefeller Foundation* beserta USAID, UKAID dan *German Cooperation* berusaha menginisiasi adanya gerakan *Green Revolution* di Afrika melalui pembentukan *The Alliance for a Green Revolution in Africa* (AGRA) pada tahun 2006. *Green Revolution* secara singkat dipahami sebagai penggambaran pendanaan melalui sistem *philanthropy* untuk pengembangan pupuk, irigasi, benih hibrida yang lebih baik beserta upaya dalam pengenalan teknologi baru terkait dengan pertanian pada negara berkembang. Dalam hal ini target sasaran yang ingin dituju oleh yayasan Bill Gates adalah adalah petani dalam skala kecil atau yang disebut sebagai *small-scale farmers* atau *smallholder farmer*, secara khusus petani skala kecil ini juga merujuk para petani yang menanam jenis makanan pokok seperti ubi, singkong, sorgum, kacang tunggak dan beras (Agra, t.ta.; Rockefeller, t.t.; Patel, 2013:5-7; Gates Foundation, t.td).

Namun sayangnya terdapat argumen yang menyatakan bahwa program yang telah ditawarkan oleh AGRA ternyata tidak mampu memberantas kemiskinan dan kelaparan negara-negara Afrika, AGRA dianggap tidak berhasil mencapai targetnya di tahun 2020 (DW, t.t). Target ini meliputi yang pertama penggandaan pendapatan pada 20 juta *smallholder farmer*; kedua, upaya dalam mengurangi kerawanan pangan sekitar 50% pada 20 negara anggota; ketiga, AGRA berusaha memastikan setidaknya 15 negara anggota menerapkan *sustainable agriculture* melalui *Green Revolution* (Putri, 2018:148). Sebagai bukti ketidakmampuan AGRA dalam memberantas kemiskinan maka peneliti kemudian akan mengecek tiga target tersebut sebagai indikator keberhasilan AGRA di Nigeria.

Pertama mengenai pendapatan para *smallholder farmer*, walaupun pertanian adalah komoditas utama Nigeria namun diperkirakan pada 2018 terdapat sekitar 88% petani Nigeria masih diklasifikasikan ke dalam petani keluarga kecil dan 72% di antaranya masih hidup dibawah garis kemiskinan. Dikatakan bahwasanya para keluarga petani ini masih hidup dengan pendapatan rata-rata sekitar \$ 1,9 per hari. (Mkindi et al, 2020; Fao, 2018; Anderson et al, 2017:1); Kedua mengenai tingkat kerawanan pangan di Nigeria, data *Global Food Security Index* di tahun 2020 menyatakan bahwasanya ketahanan pangan di Nigeria cenderung mengalami stagnasi bahkan penurunan dari tahun ke tahun, dalam data tersebut juga dapat

dilihat bahwasanya Nigeria pada tahun 2020 menduduki pada peringkat 100 dari 113 negara (Global food Index, 2020).

Gambar 2: *Nigeria's Farming System*



Sumber: Fao, 2019.

Ketiga, mengenai *sustainable Agriculture* di Nigeria. Sebenarnya Nigeria memiliki tanah subur dan curah hujan tinggi. Pada gambar 2 didapati bahwa Nigeria memiliki lahan pertanian yang luas, yaitu sebesar 78,5 hektar atau setara 80 % dari total luas lahan negara. Namun problematikanya ialah luasnya lahan pertanian ini tidak mampu meningkatkan produktivitas pangan. Inilah mengapa kemudian untuk meningkatkan produktivitas pangan di Afrika, maka Bill dan Melinda Gates Foundation melalui AGRA sedang menggalakan *sustainable agriculture* melalui *Green Revolution*. *Sustainable Agriculture* sendiri adalah sistem pertanian yang berusaha menyeimbangkan kesehatan lingkungan, kelangsungan ekonomi dan keadilan sosial masyarakat secara berkelanjutan (Allen et al, 1911 dalam Dunlap et al., 1992; Eluhaiwe, 2008:181-184).

Komponen “berkelanjutan” merujuk pada kemampuan memproduksi pangan tanpa batas dan tanpa merusak ekosistem lingkungan tempat tinggal (Schaller, 1989 dalam dalam Dunlap et al., 1992). Sebenarnya AGRA ingin melakukan peningkatan produktivitas pangan melalui penanaman varietas tumbuhan baru dan diiringi oleh pencegahan kerusakan lingkungan

sekaligus peningkatan keuntungan. Seharusnya dengan program tersebut maka pertanian di Nigeria dapat dimaksimalkan, namun sayangnya hingga saat ini tingkat produktivitas pertanian pangan di Nigeria tidak terlalu memadai. Inilah yang menjadi salah satu penyebab adanya tingkat kemiskinan absolut yang tinggi. Walaupun Nigeria telah mengeluarkan banyak dana untuk melakukan pengembangan *sustainable agriculture* namun sayangnya hal ini tidak berdampak signifikan terhadap masyarakat (Francis & David, 2012:3-7). Dari analisis tersebut maka didapati bahwa AGRA tidak dapat memenuhi targetnya di Nigeria pada tahun 2020.

Dari fenomena tersebut kemudian peneliti bertanya-tanya jika memang benar sistem *philanthropy* mampu mengatasi kemiskinan dan kelaparan lantas mengapa sistem *philanthropy* Bill dan Melinda Gates Foundation tidak dapat membantu AGRA untuk mengimplementasikan targetnya di tahun 2020? Paradoks inilah yang kemudian sangat menarik untuk dibahas. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena yang pertama karena dapat menjadi bukti teoritis mengenai ketidakmampuan sistem *philanthropy* Bill dan Melinda Gates Foundation dalam mendorong AGRA untuk mengimplementasikan targetnya di Nigeria pada tahun 2020; yang kedua dapat menjadi pondasi penelitian selanjutnya, bahwa tidak selamanya penyaluran dana bantuan luar negeri *non state actors* akan selalu membawa dampak positif bagi masyarakat. Dalam hal ini peneliti meyakini bahwasanya terdapat kesalahan terkait pelaksanaan program pemberian dana bantuan luar negeri kepada penduduk Nigeria sehingga pada akhirnya program ini tidak dapat dijalankan dengan maksimal.

1.2. Rumusan Masalah

Mengapa *philanthropy* Bill dan Melinda Gates Foundation (BMGF) dalam menginisiasi *Alliance for a Green Revolution in Africa* (AGRA) pada akhirnya tidak dapat membantu AGRA untuk mengimplementasikan targetnya di Nigeria pada tahun 2020?

1.3. Tinjauan Pustaka

Selanjutnya peneliti akan memaparkan beberapa informasi penting yang berfokus pada penelitian para akademisi sebelumnya, yang dimana tulisan para akademisi tersebut memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang dibahas oleh peneliti agar kemudian dapat dipahami alasan dasar mengapa sistem *philanthrocapitalism* Bill dan Melinda Gates Foundation tidak dapat berjalan dengan baik di Nigeria Informasi ini meliputi yang pertama, upaya dalam memberantas kelaparan dan kemiskinan di Afrika; kedua, mengenai pro dan kontra mengenai sistem *philanthropy* Bill dan Melinda Gates Foundation dalam menginisiasi gerakan *Green Revolution* melalui AGRA; ketiga, pro dan kontra mengenai adanya *Green Revolution*.

Informasi pertama, Mabhaudhi et al (2019:1-22) menyatakan bahwasanya revolusi industri yang diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk menyebabkan angka kelaparan pada *third world countries* meningkat. Pretty (1999:1-22) berpendapat bahwa kini dunia membutuhkan sistem baru untuk meningkatkan produksi pangan, salah satunya ialah *sustainable agriculture* melalui *Green Revolution*. Sistem ini dapat meningkatkan perekonomian karena menawarkan peluang baru bagi masyarakat untuk hidup lebih makmur. Mabhaudhi et al (2019:1-22) menyanggah hal tersebut, menurutnya mungkin di beberapa negara sistem ini dianggap berhasil namun tidak dengan negara-negara Afrika. *Sustainable agriculture* mendorong kelaparan di Afrika karena masyarakat dituntut menanam varietas tumbuhan yang tidak sesuai dengan sistem pangan lokal, dalam hal ini masyarakat Afrika selalu di eksploitasi.

Warren (1996:15-22) menyatakan bahwasanya kebanyakan dari sistem pertanian tradisional yang dilakukan oleh masyarakat adat selalu bersifat heterogen dan telah disesuaikan dengan iklim di sana. Sama halnya kebanyakan penduduk Afrika, sistem produksi mereka bervariasi sehingga pendapatan para petani tidak dapat bergantung pada satu jenis tanaman. Sedangkan sistem pangan global saat ini ‘menuntut’ para petani Afrika menanam tumbuhan yang hampir homogen. Para petani lokal cukup kesulitan dalam menyesuaikan varietas tanaman yang dituntut oleh pasar dunia dengan iklim yang ada, akibatnya masyarakat lokal juga kesulitan memenuhi permintaan global dan permintaan regional (Mabhaudhi et al, 2019:1-22; Fao, 2018).

Lebih lanjut Warren (1996:15-22) menyatakan bahwa sebenarnya *sustainable agriculture* yang dilakukan di Afrika akan sukses apabila sistemnya tepat. Kata ‘tepat’ merujuk pada suatu sistem yang telah disesuaikan dengan sistem pertanian lokal. Menurut ketidakmampuan *sustainable agriculture* di Afrika itu disebabkan karena masyarakat adat tidak diberikan kebebasan untuk mengelola pertaniannya. Francis & David (2012: 45-61) berpendapat bahwasanya cara yang aman untuk melakukan program pembangunan dalam aspek pertanian di Afrika ialah dengan memperhatikan kondisi masyarakat miskin di sana, terutama petani mengingat pertanian adalah komoditas utama masyarakat.

Mengenai upaya pemerintah untuk mengatasi kelaparan dan kemiskinan di Afrika, Bain et al (2013:1-9) dan Auerbach (2013:17) mengatakan bahwasanya pemerintah Afrika sendiri tidak begitu serius dalam mengatasi permasalahan di Afrika. Pemerintah hanya berfokus pada praktik politik dan kepentingan pribadi. Hal ini dibuktikan melalui banyaknya dana negara yang disalahgunakan, seperti korupsi dan lain sebagainya. Bain et al sangat skeptis terhadap upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak internasional, menurutnya

bantuan seperti program penyesuaian struktural yang bertujuan untuk menutupi defisit anggaran justru menyebabkan adanya kemerosotan dalam berbagai aspek. Selain itu menurutnya pemerintah negara-negara Afrika tidak benar-benar mengukur sejauh mana masalah kelaparan ini terjadi sehingga akibatnya mereka tidak berhasil mempertimbangkan solusi yang hendak dicapai.

Informasi yang kedua. *Philanthropy* adalah suatu tindakan kedermawanan yang dilakukan oleh *do-gooders* atau para dermawan yang bertujuan untuk kebaikan sesama dan harus dilakukan secara sukarela (Bishop & Green, 2008; Payton dan Moody, 2008). *Philanthropy* adalah wujud inovatif pihak swasta dalam membantu sesama dengan cara mengubah konsep bantuan luar negeri (Adelman, 2009: 23; Adelman, 2012:15). Banyak yang mengatakan bahwasanya *philanthropy* ini sangat baik untuk dilakukan karena pada dasarnya *philanthropy* dilakukan untuk mempromosikan kesejahteraan dan meningkatkan kepentingan bersama (Youde, 2018b:2).

Jeffrey Sachs selaku mantan Penasihat Khusus PBB untuk Tujuan Pembangunan Milenium dalam Partzsch & Fuchs (2012) menyatakan bahwasanya Bill dan Melinda Gates Foundation adalah salah satu yayasan *philanthropy* yang sangat berpengaruh dalam aspek pembangunan di abad ke-21. Namun sayangnya ketidakmampuan sistem *philanthropy* yang dilakukan oleh Bill dan Melinda Gates dalam menginisiasi AGRA membuktikan hal yang berbeda, ketidakmampuan sistem ini mempertanyakan kembali aspek moral yang terkandung dalam *philanthropy*. Youde (2018a:2) mengatakan bahwa apapun kebaikan yang terkandung dalam *philanthropy*, tidak dapat sepenuhnya mengartikan bahwa *philanthropy* itu sendiri bebas dari rasa pamrih. Hal ini didukung oleh pendapat Schuyt (2013) dalam Youde (2018a:2) yang menyatakan bahwasanya bisa jadi kegiatan *philanthropy* itu didorong oleh aspek-aspek tertentu.

Terbukti secara nyata dalam laman resmi Agra (t.t) yang menyatakan bahwa sistem pemberian yang telah diciptakan oleh Bill dan Melinda Gates Foundation dalam menginisiasi *Green Revolution* melalui AGRA mengutamakan investasi. Dengan adanya investasi maka masyarakat harus “menuruti” pihak swasta agar praktik yang dilakukan dapat selaras dengan tujuan akhir dari program yang ingin dicapai. Hal ini tentu saja berbeda dengan definisi *philanthropy* pada umumnya. Oleh karenanya Thompson (2015) dan Partzsch & Doris Fuchs (2012) mengklasifikasikan sistem *philanthropy* Bill dan Melinda Gates ke dalam kelompok yang lebih khusus yaitu *philanthrocapitalism* karena kegiatan *philanthropy* Bill dan Melinda Gates Foundation didasarkan pada kekuatan bisnis mereka.

Terkait informasi yang ketiga. Pada dasarnya banyak sekali peneliti yang optimis bahwasanya *Green Revolution* alternatif yang baik apabila digunakan untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan pada negara-negara berkembang. Dikatakan bahwasanya *Green Revolution* sendiri mampu dalam melipat gandakan hasil panen petani melalui modifikasi sistem pertanian—seperti penggunaan pupuk dan benih komersial—sehingga dapat mempercepat masa panen. Pada dasarnya para ilmuwan yang bergerak pada bidang *agriculture* berusaha untuk memperkenalkan HYV atau *High Yield Variety* kepada para petani (Sanchez, 2009:37-38; Sangha, 2014:332; Dutta, 2012:232-231; Nelson et al, 2019:1-3). Tidak hanya itu namun juga Pretty (1999:257) dan Sangha (2014:332) juga berpendapat bahwasanya transformasi teknologi sangat memungkinkan untuk membuat sistem pertanian semakin produktif, ketika sistem pertanian produktif maka kerawanan pangan dan kemiskinan dapat diatasi, dengan demikian maka populasi dunia dapat bertumbuh dengan baik.

Gimenez (2008:464-465) menyatakan bahwa mungkin memang benar *Green Revolution* dapat meningkatkan hasil pertanian, namun pada kenyataannya masyarakat miskin masih tidak mampu dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya *Green Revolution* justru menyebabkan masyarakat miskin semakin terpuruk karena terdapat pihak-pihak yang sengaja menekan masyarakat adat di negara berkembang untuk membeli pangan dari pasar global ketimbang mereka memproduksi sendiri, tidak hanya itu namun ironisnya disaat yang bersamaan masyarakat miskin ini juga juga dituntut memenuhi permintaan pasar ketimbang memenuhi kebutuhan pribadi. Selain itu, Wise (2020:7) berpendapat *Green Revolution* juga dapat menyebabkan adanya *environmental issues* seperti terkontaminasinya air dan penurunan kesuburan tanah.

Dari paparan materi diatas, lantas kemudian dalam hal ini peneliti menemukan beberapa fakta menarik untuk kemudian diteliti lebih lanjut. Fakta yang pertama, sistem penyaluran dana bantuan Bill dan Melinda Gates Foundation terhadap masyarakat Afrika melalui AGRA lebih cocok untuk diklasifikasikan sebagai *Philanthropicalism*; kedua, tidak selamanya *Green Revolution* dapat membawa dampak positif bagi masyarakat; ketiga, peneliti meyakini bahwasanya ketidakmampuan sistem *philanthrocapitalism* bukan semata-mata karena masyarakat tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh pihak swasta melainkan karena masyarakat kurang bebas untuk menentukan jalan hidupnya. Sejauh ini peneliti belum menemukan adanya tulisan yang menjelaskan mengenai sistem *philanthrocapitalism* sebagai salah satu penyebab ketidakmampuan AGRA dalam melaksanakan *Green Revolution* di Afrika—khususnya Nigeria. Oleh karenanya dalam hal ini peneliti akan membahas mengenai

penyebab ketidakmampuan *philanthrocapitalism* dalam membantu AGRA untuk mengimplementasikan targetnya di Nigeria pada tahun 2020. Permasalahan ini sangat penting untuk dibahas karena pada akhirnya penelitian ini dapat mengungkap suatu kegagalan dari sistem bantuan luar negeri *non-state actors* yaitu *philanthrocapitalism*.

1.4. Kerangka Pemikiran

Meninjau kembali latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, ketidakmampuan sistem *philanthrocapitalism* Bill dan Melinda Gates Foundation dapat dipahami melalui kerangka pemikiran sebagai berikut:

1.4.1. *Philanthrocapitalism* sebagai Sistem yang Hierarki.

Agar *philanthrocapitalism* dipahami sebagai sistem yang *hierarchy*, pertama-tama harus dipahami bahwa dalam *philanthrocapitalism* terdapat dua kelompok yang saling berhadapan yaitu pihak swasta dan masyarakat miskin. Thorup (2013:563) menyatakan bahwa dana yang diberikan oleh pihak swasta kepada masyarakat bukanlah hibah, melainkan mereka menggunakan sistem kapitalisme terutama model laba sebagai sarana dalam memberikan dana bantuan. Oleh karenanya dalam memberikan bantuan, pihak swasta berharap para penerima dana akan mengolah, mengembangkan bahkan berkewajiban untuk mengembalikan dana yang telah diberikan. Dalam hal ini pihak swasta juga menilai bahwa dana yang diberikan adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengontrol para penerima bantuan (Thompson, 2015).

Adelman (2009:23-24) menyatakan bahwasanya dalam memainkan perannya, pihak swasta memposisikan masyarakat miskin sebagai mitra aktif dalam investasi yang berdampak pada pembangunan negara. Bentuk kegiatan *philanthrocapitalism* yang dilakukan oleh pihak swasta selalu berfokus pada kepemilikan lokal atas proyek, akuntabilitas, transparansi, pelayanan yang efisien dan hasil yang berkelanjutan. Argumen ini kemudian didorong oleh pendapat Thompson (2015) yang menyatakan bahwasanya sistem *philanthrocapitalism* sebenarnya berusaha untuk mengubah badan publik untuk menjadi mitra bisnis mereka sehingga dalam hal ini pihak swasta mendapatkan kesempatan untuk merebut sumber daya publik agar mereka mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri.

Sejak awal munculnya terminologi *philanthrocapitalism* oleh Matthew Bishop dan rekannya Michael Green melalui buku yang berjudul “*Philanthrocapitalism: How Giving Can Save the World*”, Bill Gates menyatakan bahwasanya *philanthrocapitalism* adalah sebuah bentuk dari sistem ‘kapitalisme kreatif’ yang dapat membantu orang miskin untuk keluar dari kondisi mereka yang sangat tidak memungkinkan (Adelman, 2009:24; *Philanthrocapitalism*, t.t).

Memang pada dasarnya istilah dasar dari *philanthrocapitalism* itu sendiri telah menggambarkan sebuah gagasan mengenai kapitalisme yang dianggap sebagai sebuah bentuk dari bantuan amal itu sendiri (Thorup, 2013:556). Tidak heran apabila sebagian orang menganggap bahwasanya *philanthrocapitalism* adalah upaya yang dilakukan oleh pihak swasta dalam mencapai keuntungan melalui metode *philanthropy*.

Lebih lanjut Thorup (2013:557-559) menyatakan bahwasanya agar dapat terlibat dalam praktik kapitalis maka pihak swasta harus menemukan legitimasinya melalui keyakinan diri untuk dapat mengatur kondisi dan situasi yang ada melalui tindakan yang sesuai. Hal ini kemudian dicerminkan melalui kebijakan agar terciptanya suatu kondisi yang kondusif. Lebih lanjut Thorup menjelaskan bahwasanya *philanthrocapitalism* mencerminkan adanya hubungan hierarki eksplisit yang dimana salah satu pihak dianggap lebih unggul ketimbang pihak lainnya, ketika ada posisi yang asimetris maka kelompok yang lebih unggul ini dapat mengintimidasi kelompok yang lebih lemah.

Bahkan dikatakan dalam Bosworth (2011:384-385) bahwasanya intimidasi pihak swasta terhadap masyarakat miskin dapat dilihat melalui sistem monopoli pasar yang akan atau telah diciptakan. Youde (2018b:1) berpendapat bahwasanya dalam Hubungan Internasional kontemporer saat ini, pengaruh *philanthropy* dalam politik internasional tidak dapat dihindarkan. Hal ini tentu saja perlu ditanggapi dengan serius karena mereka memiliki pengaruh yang besar untuk mengubah agenda politik global, walaupun pada hakekatnya mereka tidak dapat menggantikan kehadiran negara sepenuhnya. Lebih jauh Ramdas (2011:439) berpendapat bahwa sebenarnya para kritikus *philanthrocapitalism* tidak benar-benar menentang adanya pemberian bantuan dana sosial sebagai wujud kebaikan pihak swasta kepada masyarakat miskin, namun yang menjadi masalah adalah adanya kekuatan dalam proses pembuatan kebijakan dan pengaturan agenda elit global.

1.4.2. Intervensi Pihak Swasta.

Dalam melakukan sistem *philanthrocapitalism* pihak swasta terlalu berfokus pada intervensi ekonomi. Ketika melakukan pembangunan untuk masyarakat miskin, maka secara tidak langsung pihak swasta juga merampas hak-hak kehidupan pribadi masyarakat. Hal ini karena dalam konteks produksi masyarakat tidak memiliki hak untuk menguasai hasil produksi yang berasal dari tanah pribadi mereka sebagai sarana penghidupan. Kenyataan yang ada saat ini mengatakan bahwasanya banyak orang yang meninggal bukan karena mereka kurang pendapatan namun mereka meninggal dikarenakan kurangnya akses pada kekayaan milik bersama (Ramdas, 2011:395).

Kaum *Philanthrocapitalism* membantah dan mengatakan bahwa sistem keuangan mikro yang mereka gunakan dapat membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan akses pada pengelolaan keuangan yang lebih luas yaitu menuju pada sumber tabungan, kredit dan pelayanan keuangan lainnya yang dianggap baik. Selain itu keuangan mikro juga dapat meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat sehingga mereka tidak perlu menjual aset-aset ketika berada dalam keadaan sulit (Edward, 2009:248). Sistem keuangan mikro berusaha memberikan solusi baru untuk mengatasi kemiskinan yang berkaitan dengan produksi dan pendistribusian barang dan jasa oleh masyarakat miskin. Prahalad (2006, dalam Edward, 2009:248) mengatakan bahwasanya kontribusi masyarakat miskin dalam pasar industri dan distribusi pendapatan global dapat mensejahterakan mereka.

Namun sayangnya tidak ada bukti yang membuktikan bahwasanya sistem keuangan mikro tersebut benar-benar dapat mensejahterakan masyarakat miskin dengan sendirinya. Hal ini dibenarkan Aneel Karnani (2007 dalam Edward, 2009:248), menurutnya sistem tersebut tidak benar-benar dapat dilakukan oleh masyarakat miskin karena produk dan jasa yang dijual oleh masyarakat miskin pada akhirnya kalah bersaing dengan produk di pasaran. Untuk dapat mengeluarkan masyarakat miskin dari kemiskinan maka harus ada sistem yang dianggap mampu mengatasi keadaan ini. Yang dimana seringkali sistem ini memiliki langkah-langkah yang lebih kompleks karena berkaitan dengan upaya pengembangan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan dengan gaji yang memadai melalui agroindustrialisasi padat karya dalam skala besar (Edward, 2009:248-249).

Namun sayangnya hal ini tidak dapat menyelesaikan beberapa problem kemiskinan yang sangat mendalam, beberapa orang yang miskin akan tetap miskin. Oleh karenanya dalam hal ini lembaga keuangan mikro juga membutuhkan subsidi berkelanjutan untuk menjangkau masyarakat yang sangat miskin. Inilah kemudian yang dikritik oleh kaum anti-*philanthrocapitalism*, menurut mereka kaum *philanthrocapitalism* sering mengabaikan hal-hal penting seperti perubahan struktur sosial dan politik masyarakat yang diakibatkan dengan adanya upaya pembangunan yang terlalu *massive*. Menurut mereka hasil akhir dari upaya ini adalah ketidakmampuan besar. Hal ini dikarenakan alih-alih menjadikan masyarakat miskin sebagai pengendali, mereka justru ‘menyetir’ masyarakat miskin ini agar menuruti apa yang mereka inginkan (Edward, 2009:248-249).

1.4.3. Pengaruh *Philanthrocapitalism* dalam Melemahkan Sistem Pertanian Tradisional melalui *Green Revolution*.

Berkaitan dengan sistem pertanian tradisional, Brosius et al (1983:188-189) menjelaskan bahwa interkoneksi antara masyarakat adat dan lingkungan tempat tinggal akibat dipengaruhi faktor historis dan pengalaman. Sudut pandang etnoekologi mengatakan bahwa penggambaran manusia terhadap lingkungan mereka adalah konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh pemikiran, pengetahuan dan bahasa. Manusia merespon adanya rangsangan dari lingkungan mereka lalu kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi ini akan mengubah cara pandang manusia untuk bertindak. Alih-alih dipengaruhi lingkungan, manusia cenderung untuk mempengaruhi lingkungan mereka sesuai dengan apa yang mereka bayangkan dan kemudian perilaku ini akan menjadi sebuah budaya. Singkatnya pola perilaku budaya masyarakat adat dalam bercocok tanam telah dianggap sesuai dan adaptif dengan lingkungannya.

Masyarakat dan pertanian tidak dapat dipisahkan, terutama bagi beberapa negara berkembang yang menjadikan pertanian sebagai komoditas penting. Namun kini dunia kontemporer semakin memarginalkan masyarakat miskin pada negara berkembang yang menjadikan pertanian sebagai pendapatan utama. Akibatnya muncullah stigma yang dimana sebagian orang memandang bahwasanya sistem pertanian tradisional tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan akibat populasi masyarakat yang meningkat dan mereka menuntut adanya modernisasi pertanian tradisional agar kebutuhan pangan masyarakat dunia terpenuhi (Francis & David, 2012:45).

Perubahan terjadi ketika pertanian tradisional mengalami modernisasi. *Green Revolution* sebagai wujud modernisasi sistem tanam dipercaya mampu merespon perkembangan teknologi sehingga menghasilkan sistem pertanian yang sangat produktif. Hal ini dikarenakan teknologi cenderung menghasilkan varietas tanaman homogen dalam jumlah besar. Oleh karenanya dalam mengatasi kelaparan dan kemiskinan pada negara berkembang biasanya homogenitas varietas tanaman memang sengaja dilakukan, Upaya ini dilakukan melalui penggunaan benih hibrida dan pupuk kimia yang telah direkayasa secara genetik sehingga dapat memotong masa panen; pengembangan pasar; investasi infrastruktur, reformasi kebijakan pertanian serta penggunaan teknologi. Menurut beberapa orang heterogenitas varietas tanaman menyebabkan hasil panen yang rendah akibat sistem pertaniannya yang rumit dan beragam, akibatnya mereka jauh dari jangkauan pasar dan infrastruktur (Pretty, 1999:257; Gimenez, 2008:466-467).

Dalam melaksanakan *Green Revolution* pada suatu negara diperlukan adanya kerjasama yang dibangun antara pemerintah, para petani dan pihak-pihak eksternal lainnya seperti NGO,

Institutional philanthropy, para ilmuwan dsb. Hadirnya organisasi *philanthropy* yang memunculkannya sistem *philanthrocapitalism* telah menyebabkan banyak sekali perdebatan. Terlebih lagi *philanthrocapitalism* berfokus pada intervensi ekonomi dan kontrol yang dilakukan pihak swasta terhadap masyarakat sebagai faktor penting dalam keberhasilan. Easterly (2007) mengatakan bahwasanya kini konsep bantuan telah berubah dan menimbulkan suatu ancaman, bantuan awalnya memiliki konsep sebagai “pencari” namun ini berubah menjadi konsep “perencana”. Hal ini dikarenakan pada akhirnya para pendonor tidak memberikan bantuan tersebut secara ikhlas dan memberikan wewenang bagi masyarakat untuk menentukan nasibnya, namun justru “menyetir” mereka. Ramdas (2011:395) mengatakan bahwasanya penyebab kemiskinan dan kelaparan di dunia bukan karena kurangnya pendapatan masyarakat namun hal ini disebabkan oleh kurangnya akses kepada sumber daya dan kontrol akan penghidupan mereka.

Ketika *philanthrocapitalism* mempengaruhi *Green Revolution* maka timbullah ancaman, karena sistem produksi masyarakat miskin yang digerakan oleh sistem kapitalis pada akhirnya hanya untuk keuntungan pribadi pihak swasta. *Smallholder farmer* semakin terjatuh hutang besar karena mereka tidak mampu mempertahankan keuntungan hasil panen melalui penjualan mereka dikarenakan biaya yang tinggi. Terlebih lagi kini pertanian sedang dihadapkan pada suatu perubahan besar yang sangat mengancam. Bukan hanya mengenai peningkatan populasi manusia yang berpengaruh pada menipisnya ketersediaan pangan, namun *Green Revolution* menyebabkan keanekaragaman genetik yang menyebabkan degradasi lahan dan air. Walaupun *Green Revolution* menghomogenisasi tanaman pangan, namun hal ini tidak menjamin hasil produksi secara komprehensif. Bahkan bisa dikatakan bahwasanya peningkatan produktivitas hasil tanam sangat mengecewakan (Francis & David, 2012:46-47; Wise, 2020:8-19). Alih-alih dengan adanya input eksternal untuk meningkatkan hasil pertanian agar dapat mengatasi kelaparan, pemerintah lebih baik membuat suatu regulasi atau upaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan melalui proses yang alami dan tradisional (Auerbach et al, 2013).

1.4.4. Otonomi dan Masalah Ketergantungan melalui Konsep “Perencana” vs “Pencari” dalam *philanthrocapitalism*.

Sebagian orang berpendapat bahwasanya sistem pemberian dana bantuan oleh organisasi amal kepada orang miskin tidak dapat sepenuhnya membantu mereka untuk bangkit dari keterpurukan karena menyebabkan adanya ketergantungan. Weindel (2016:170-171) berpendapat bahwasanya sistem *philanthropy* dapat digunakan untuk mengatasi masalah

kemiskinan asalkan pihak swasta memberikan wewenang dan menghormati kemampuan masyarakat miskin untuk mengontrol hidup mereka sendiri. Namun dalam hal ini peneliti tidak benar-benar menemukan pemberian wewenang oleh pihak swasta kepada orang miskin melalui metode *philanthrocapitalism*. Alih-alih memberikan wewenang, pihak swasta justru malah menyetir kaum miskin untuk melakukan apa yang mereka anggap baik. Dasar belakang *philanthrocapitalism* sendiri adalah untuk investasi, jadi secara tidak langsung pihak swasta mengharapkan adanya *feedback* yang diberikan oleh masyarakat miskin kepada mereka.

Easterly (2006 dalam Weindel, 2016:171-173) berpendapat bahwasanya memang sebagian besar dana bantuan itu akan datang dari mereka yang dijuluki sebagai “Perencana” dan bukan “Pencari”. Seorang “Perencana” biasanya berniat untuk mengatasi kemiskinan global melalui metode *Top Down*. Ia berusaha untuk menyelesaikan permasalahan dengan metode dari ‘luar’ untuk digunakan ‘dalam’. Seorang “Perencana” merasa bahwasanya mereka memiliki suatu keahlian khusus dan ilmu pengetahuan yang cukup untuk digunakan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di negara berkembang. Biasanya seorang “Perencana” berfokus pada suatu proyek yang besar sebagai solusi utama dalam mengatasi kemiskinan. Selain itu dalam Edward (2009:244-248) dikatakan bahwasanya seorang “Perencana” cenderung menekankan pada kontrol donor sebagai sarana dalam mencapai keberhasilan. Pendekatan ini berusaha untuk menyingkirkan segala bentuk ketidakpastian yang ada dalam proses kerjasama, tidak hanya itu tapi biasanya para pendonor yang melakukan pendekatan ini cenderung lebih *aggressive* dalam melakukan perencanaan karena tujuan mereka adalah hasil akhir.

Sedangkan seorang yang disebut sebagai “Pencari” biasanya ia adalah seseorang yang bekerja dengan metode *bottom up*, artinya dalam menyelesaikan masalah dalam suatu wilayah maka akan berusaha untuk melakukan pemahaman dan beradaptasi dengan keadaan masyarakat lokal. Lalu kemudian dia akan menggabungkan proyek-proyek kecil yang memiliki fungsi untuk pendorong ekonomi pasar lokal yang ada pada negara-negara miskin (Easterly, 2006 dalam Weindel, 2016:171-173). Biasanya seorang “pencari” cenderung menjadikan pasar sebagai sebuah sarana untuk mengatasi kemiskinan dan mencapai tujuan sosial (Edward, 2009:244-248).

1.5. Argumen penelitian:

1.5.1. Sistem dana bantuan Bill dan Melinda Gates Foundation dalam menginisiasi AGRA di Afrika menciptakan sistem kapitalis baru dan menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Mereka berusaha “mencangkok” kan sistem pertanian “asing” secara paksa kepada masyarakat adat di Nigeria sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian produksi pangan.

1.5.2. Ketidakmampuan sistem penyaluran dana bantuan Bill dan Melinda Gates Foundation disebabkan oleh sifat yang *Top Down*. Terdapat hubungan relasi kuasa asimetris antara Bill Melinda Gates Foundation dan masyarakat adat, yang menyebabkan AGRA tidak dapat mencapai targetnya di Nigeria pada tahun 2020.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini secara khusus akan dibatasi pada ketidakmampuan sistem *philanthrocapitalism* Bill dan Melinda Gates Foundation dalam mendorong AGRA untuk mengimplementasikan janjinya di Nigeria sejak tahun 2006 hingga 2020. Alasan mengapa peneliti membatasi pada periode 2006 adalah karena pada tahun tersebut merupakan tahun awal munculnya AGRA di Nigeria, sedangkan alasan mengapa penelitian ini dibatasi hingga tahun 2020 adalah karena pada tahun tersebut AGRA dianggap tidak berhasil dalam memenuhi targetnya.

1.6.2. Tipe Penelitian:

Penelitian ini akan dilakukan secara eksplanatif dan digunakan untuk mengkonfirmasi argumen penelitian dengan mengkaji keterkaitan antar variabel, yakni keterkaitan antara ketidakmampuan sistem *philanthrocapitalism* Bill dan Melinda Gates Foundation sebagai variabel independen dan sistem *Green Revolution* melalui AGRA di Nigeria sebagai variabel dependen.

1.6.3. Teknik pengumpulan data:

Penelitian ini menggunakan data primer yang dalam dari dokumen pemerintahan, dokumen yang berasal dari pihak swasta—dalam hal ini adalah Bill dan Melinda Gates Foundation dan dokumen yang berasal dari organisasi internasional. Sedangkan data sekunder peneliti didapat dari buku, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, media cetak dan media daring yang telah teruji kredibilitasnya. Untuk membuktikan argumen dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif yang menekankan pada interpretasi peneliti terkait dengan sumber-sumber data yang telah didapat.

1.7. Sistematika Penelitian

Penelitian ini terbagi ke dalam lima bab: Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tinjauan Pustaka, Kerangka pemikiran, Argumentasi peneliti, Jangkauan Penelitian, Tujuan penelitian, Tipe Penelitian, Teknik Pengumpulan Data.

Bab kedua berisi mengenai dinamika sistem *Philanthrocapitalism* Bill dan Melinda Gates Foundation dalam mengatasi kemiskinan serta kelaparan di Nigeria beserta kepentingan yang mengikutinya. Bab ketiga berisi mengenai upaya, pelaksanaan dan pengaruh *Green Revolution* AGRA di Nigeria untuk Mencapai Sustainable Agriculture. Bab keempat berisi mengenai analisis sistem *Philanthrocapitalism* Bill dan Melinda Gates Foundation sebagai penyebab ketidakmampuan Green Revolution di Nigeria melalui AGRA Foundation. Bab kelima berisi kesimpulan.